

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada banyak alasan mengapa penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **Strategi Dinas Perdagangan Propinsi. DIY Dalam Meningkatkan Ekspor Produk Kulit Ke Pasar Amerika Serikat.** Paska dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah, maka setiap propinsi diberi kewenangan untuk mengatur roda perekonomian dan pembangunan daerahnya masing-masing. Diberinya kewenangan kepada daerah untuk melakukan hubungan yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri telah membawa dimensi baru dalam pelaksanaan politik luar negeri RI. Meskipun dari sudut perundang-undangan, politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari gerak dan kepentingan daerah.

Kerjasama oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga/pihak di luar negeri jelas merupakan peluang bagi percepatan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya harus memberi manfaat pada masyarakat daerah terutama dalam segmen pelayanan publik. Karena itu daerah dituntut untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk peningkatan dan ketersediaan sumber daya manusia yang baik.

Industri barang kulit pada umumnya dan kerajinan kulit pada khususnya merupakan salah satu primadona dan menempati posisi tertinggi dalam ekspor Propinsi DIY. Dengan semakin ketatnya perdagangan bebas para eksportir kulit dihadapkan

pada berbagai kesulitan untuk meningkatkan produknya ke pasar internasional. Di sinilah arti penting Pemerintah dan juga Dinas Perdagangan Propinsi DIY sebagai mitra, wadah dan fasilitator bagi para eksportir, membantu dalam menjawab setiap tantangan yang dihadapi oleh para eksportir daerah.

Amerika Serikat sejak dulu merupakan pasar yang sangat potensial bagi Propinsi DIY dalam memasarkan produk-produk ekspor daerah. Untuk produk kulit terus mengalami peningkatan permintaan sebagai dampak dari semakin tingginya kebutuhan dari masyarakat Amerika Serikat. Pemerintah Pusat maupun Daerah, melalui Dinas Perdagangan haruslah memanfaatkan peluang emas ini sebaik mungkin yang pada akhirnya membantu dalam perolehan devisa negara maupun daerah, salah satunya melalui peningkatan ekspor produk kulit ke negara Amerika Serikat.

Selama mengikuti program magang di Disperindagkop Propinsi DIY seksi fasilitasi ekspor dan impor, penulis memiliki cukup bahan yang bisa dijadikan bahan penulisan skripsi ini, selain itu masih sedikitnya literatur mengenai ekspor Propinsi DIY terutama dalam hal ini ekspor produk kulit, dan Dinas Perdagangan Propinsi DIY. Mengingat masalah yang penulis ambil ini masih sedikit yang menelitinya sehingga inilah yang juga menjadi motivasi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi Dinas Perdagangan Propinsi DIY dalam meningkatkan ekspor produk kulit ke pasar Amerika Serikat
2. Meneliti pangsa pasar di Amerika Serikat, serta peluang bagi produk ekspor kulit asal Propinsi DIY
3. Mengetahui kepentingan Indonesia di balik kebijakannya dalam mengembangkan ekspor produk kulit ke Amerika Serikat.
4. Meneliti peran Dinas Perdagangan Propinsi DIY dalam membantu para eksportir produk kulit asal Propinsi DIY serta meningkatkan ekspor produk kulit ke Amerika Serikat.
5. Bekal menghadapi dunia kerja

C. Latar Belakang Masalah

Adanya proses globalisasi yang semakin cepat diikuti dengan tingkat persaingan internasional yang semakin tajam memberikan dampak yang cukup rumit bagi setiap negara, terutama negara-negara berkembang (*underdevelopment*).¹ Negara-negara berkembang harus mengejar segala ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lama kokoh dan mapan di segala bidang yang mana apabila tidak segera disigapi oleh

¹ *Underdevelopment* adalah istilah yang pertamakali yang dilontarkan oleh presiden Truman saat memangku pemerintahan 20 Januari 1949 yang bisa dilihat pada Customs Forum "Development" dalam *Welfare State* (1949) K. H. (1949) Development

masing-masing pemerintah suatu negara, maka negara yang bersangkutan akan terus terpuruk di tengah globalisasi yang dikenal tidak pandang bulu.

Di era perdagangan bebas yang sangat kompetitif ini, semua negara dituntut untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar internasional dengan menerapkan suatu standar mutu tertentu, yang di dalamnya mengatur tentang kualitas produksi pengepakan, pengiriman, sistem pembayaran, promosi (*marketing*) dll. Produk dalam negeri harus bisa bersaing dengan produk luar, baik masalah harga, mutu, pemasaran agar mereka bisa *survive* atau bertahan. Pada era perdagangan bebas yang dibutuhkan bukan perusahaan yang besar, tapi perusahaan yang lebih gesit dan lebih *inovatif*. Dalam hal ini eksportir harus selalu mengikuti perkembangan pasar yang selalu berubah dengan cepat.

Sektor perdagangan merupakan sektor penting bagi setiap negara dalam memperoleh devisa. Indonesia pada era pembangunan mengoptimalkan sektor ini dalam memperoleh devisa di mana sektor migas adalah ujung tombaknya. Seiring berjalannya waktu, sektor migas ternyata tidak bisa selamanya diandalkan karena migas adalah SDA yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu Pemerintah Indonesia mencari *alternatif* lain, yaitu memberdayakan ekspor dari sektor non-migas sebagai andalan ekspor Indonesia selanjutnya.

Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 dan otonomi daerah telah ikut mewarnai pada pengalihan pemerintahan

daerah.² Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, “ *outonomos/autonomia*”, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*) yang secara terperinci, mengandung pengertian; pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa³ Paska dikeluarkannya peraturan tersebut, maka diberikannya kewenangan kepada daerah untuk melakukan hubungan yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri dan itu telah membawa dimensi baru dalam pelaksanaan politik luar negeri RI. Hal ini sebenarnya merupakan strategi Pemerintah Pusat meskipun dari sudut perundang-undangan, politik luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari gerak dan kepentingan daerah.

Otonomi daerah seperti mata koin, di mana di satu sisi menguntungkan dan di satu sisi lain dapat merugikan. Merugikan di sini di mana otonomi yang memberikan keleluasaan para eksportir dalam beraktifitas dapat saja mematikan para eksportir yang tidak siap baik itu dana, kualitas maupun kwantitas, *channel* pasar dll. Persaingan antar eksportir dalam merebut dan mempertahankan pasar akan semakin ketat. Baik itu pasar di dalam maupun luar dan persaingan antar para eksportir dari dalam maupun dari luar. Siapa saja yang tidak siap akan terlindas oleh persaingan pasar yang semakin ketat.

² Sidiq Jambik, *Organisasi Daerah dan Hubungan Internasional* Yogyakarta, 2001 hal. 1

Kerjasama oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga/pihak di luar negeri jelas merupakan peluang bagi percepatan pembangunan daerah yang dalam segi pelaksanaannya harus memberi manfaat kepada masyarakat daerah. Sebenarnya otonomi daerah merupakan tujuan pemerintah agar daerah dapat lebih otonom dalam menjalankan roda perekonomian dan pembangunan daerah, sehingga dalam hal pembangunan roda perekonomian dan pembangunan terutama paska krisis moneter yang melanda Asia dan paska bencana gempa yang melanda Yogyakarta di tahun 2006, dapat lebih cepat kembali ke kondisi awal bahkan lebih baik dari waktu sebelumnya. Sehingga boleh dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan strategi pemerintah dalam merangsang pembangunan daerah. Strategi sendiri mengandung pengertian "*plan intended to achieve a particular purpose*", atau dalam bahasa Indonesia; rencana yang bertujuan/bermaksud untuk mencapai tujuan. Dalam melaksanakan strategi pemerintah itu, daerah dituntut untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk peningkatan dan ketersediaan sumber daya manusia yang baik

Secara garis besar, Prop. DIY memiliki SDM dan SDA yang sangat baik, yang apabila diberdayakan secara optimal dapat membantu Pemerintah dalam hal perolehan devisa. Betapa tidak, Propinsi. DIY telah berperan dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah, melalui sumbangan terhadap negara, yang selama 5 tahun (2000-2004), sumbangannya mengalami peningkatan dari 6,12% menjadi 8,51% dan menduduki posisi ke-4 setelah sektor pertanian, jasa dan industri

pengolahan.⁴ Pada umumnya *skill* dan produk yang dihasilkan Propinsi. DIY memiliki nilai seni yang tinggi dan diminati konsumen manca negara. Ini dikarenakan, produk yang dihasilkan memiliki nilai seni yang tinggi, corak yang beraneka ragam, kualitas yang baik dan harganya yang relatif murah.

Industri kulit pada umumnya dan kerajinan kulit pada khususnya merupakan salah satu komoditi unggulan dan primadona ekspor Propinsi. DIY. Komoditi ini menempati posisi tertinggi dalam ekspor Propinsi. DIY. Volume ekspor dari komoditi ini yang terbesar adalah kulit lembaran tersamak dan sarung tangan dari kulit. Kerajina kulit juga cukup potensial terutama kerajinan tas, dompet, ikat pinggang, kerajinan *tatah sungging*, sehingga banyak sentral industri kulit yang cukup terkenal di Yogyakarta sekaligus mendukung predikat Yogyakarta sebagai kota wisata.

Mengingat besarnya potensi industri kulit di Yogyakarta, maka dukungan dari pemerintah juga cukup besar. Hal ini terbukti dengan adanya Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet dan Plastik yang ada di Yogyakarta di samping juga Akademi Teknologi Kulit yang menghasilkan para Ahli Madya di bidang Industri Perkulitan.

Dalam hal pemasaran produk, Amerika Serikat merupakan pasar utama bagi produk ekspor Indonesia setelah Uni Eropa. Ekspor Indonesia ke AS sebesar US\$ 9,173 milyar pada tahun 1997 menjadi US\$ 9,337 milyar pada tahun 1998, US\$ 9,513

⁴ ...

miliar pada tahun 1999, dan sebesar US\$ 10.385 miliar pada tahun 2000 yang merupakan rekor dan melebihi nilai ekspor Indonesia ke AS bahkan sebelum krisis ekonomi Asia. Nilai ekspor dalam tiga tahun bulan pertama tahun 2001 mencapai US\$ 2,635 miliar. Meningkatnya nilai ekspor Indonesia antara lain disebabkan *booming* perekonomian AS dalam kurun waktu 1996-2000 yang ditunjukkan dengan meningkatnya keseluruhan impor AS. Namun, secara prosentase pangsa ekspor Indonesia dalam keseluruhan impor AS, menurun dari sebesar 1,05% pada tahun 1997 menjadi sebesar 1,02% pada tahun 1998, 0,93% pada 1999 dan hanya 0,85 dari keseluruhan impor pada tahun 2000.⁵

Amerika Serikat juga merupakan pasar utama bagi Prop. DIY dalam memasarkan produknya. Realisasi ekspor komoditi kulit disamak pada triwulan I tahun 2004 menempati posisi III dalam perolehan devisa, walaupun volume ekspor ini pada triwulan I tahun 2004 hanya mencapai 45.127 kg atau 0,44% dari volume ekspor DIY, namun perolehan devisa mencapai US\$ 4,402,303.60 atau 13.02% dari ekspor DIY. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2003 menunjukkan adanya penurunan dalam volume ekspor yang mencapai 102.566 kg menjadi 45.127 kg pada triwulan I tahun 2004, namun pada realisasi nilai ekspor peningkatan sebesar 97,19% dari nilai US\$ 2,232,483.04 pada triwulan I tahun 2003 menjadi US\$ 4,402,303.60 pada triwulan I tahun 2004.

Untuk produk sarung tangan kuli, realisasi ekspor pada triwulan I tahun 2004 ada pada peringkat ke-5 dalam perolehan devisa. Walaupun komoditi ini hanya dapat merealisasi volume ekspor sebesar 51.848,35 atau 0,50% dari volume ekspor DIY, namun demikian realisasi nilai ekspor mencapai US\$ 3,079,248.91 atau 9.11 % dari nilai ekspor DIY secara keseluruhan. Dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2003, menunjukkan adanya penurunan dalam volume ekspor, di mana volume ekspor komoditi ini mengalami penurunan 2,20 % dari 53.014.30 kg pada triwulan I tahun 2003, menjadi 51.848.35 kg pada triwulan I tahun 2004, sedangkan realisasi nilai ekspor mengalami peningkatan 11.77 % di mana tercatat realisasi ekspor pada triwulan I tahun 2003 mencapai 2,754,911.39 US\$ menjadi 3,079,248.91 US\$ pada triwulan I tahun 2004⁶

Dalam mengembangkan ekspor kulit ke Amerika Serikat, semua itu tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi para eksportir itu sendiri, baik itu dari dalam maupun dari luar. Hambatan-hambatan tersebut antara lain mengenai standarisasi produk, bea masuk dan perpajakan, prosedur mengenai peraturan ekspor dari Indonesia dan impor dari Amerika Serikat yang panjang dan berbelit belit, yang semua itu menghambat kinerja ekspor produk kulit ke Amerika Serikat. Ditambah lagi adanya isu dalam perdagangan bebas mengenai standarisasi produk, kesehatan (bebas penyakit kulit dan kuku) untuk produk ekspor peternakan, isu mengenai lingkungan hidup,

⁶ Data Statistik Ekspor dan Impor Provinsi DIY 2004 Diunduh dari <http://www.diy.go.id>

dan juga adanya hambatan dari para eksportir itu sendiri. Seperti tentang kurangnya pengetahuan tentang cara menghasilkan barang yang sesuai dengan standar mutu internasional, kurangnya pengetahuan akan *channel* pasar di Amerika Serikat, kurangnya pengetahuan akan selera permintaan di Amerika Serikat dll. Maka dari itu, Dinas Perdagangan dalam hal ini yang ada di Propinsi. DIY di mana mempunyai peran sebagai mitra daerah dan juga eksportir haruslah memanfaatkan segala sumberdaya yang ada di mana dalam hal ini yaitu dari ekspor produk kulit, untuk meningkatkan perolehan devisa daerah pada khususnya dan negara pada umumnya dari sektor non-migas.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

“ Strategi apa yang dilakukan Dinas Perdagangan Propinsi. DIY dalam meningkatkan ekspor produk kulit ke pasar Amerika Serikat”

Pemerintah Pusat maupun Daerah itu sendiri dalam membantu perolehan devisa negara maupun daerah adalah landasan bagi peran Pemerintah Pusat maupun Daerah dan juga Dinas Perdagangan dalam peranannya masing-masing. Memang keperibadian dan sikap orang yang menjadi Pemerintah Pusat maupun Daerah, Menteri Perdagangan dan Kepala Dinas Perdagangan mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, tetapi keputusan itu dibuat ketika ia menjalankan suatu peranan atau serangkaian peranan.

Menurut John Wahlke, teori peran memiliki dua kemampuan bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya,⁹ seperti dalam hal ini, Kepala Dinas Perdagangan akan berusaha menjalankan perannya sebagai fasilitator maupun mitra bagi para eksportir dalam meningkatkan ekspor masing-masing daerah.. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Sebagai contoh; Dinas Perdagangan akan bertindak/melaksanakan perannya, kewajibannya sebagai fasilitator bagi daerah,

⁹ John Wahlke, "The Role of the State in International Trade," *Journal of International Law and Economics*, Vol. 1, No. 1, 1972, p. 15.

dan juga para eksportir dalam meningkatkan ekspor produk daerah. Begitu juga Pemerintah Pusat maupun Daerah bersama Dinas Perdagangan daerah, berusaha dalam membantu meningkatkan pembangunan dan juga perekonomian negara pada umumnya maupun daerah pada khususnya yang dalam hal ini dengan cara meningkatkan ekspor daerah untuk produk kulit asal Propinsi. DIY ke pasar Amerika Serikat. Selain itu Dinas Perdagangan juga mempunyai peran sebagai pendorong untuk menempatkan dunia Usaha dan Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan industri dan perdagangan dan juga berperan sebagai perumus kebijakan dan fasilitator bagi pertumbuhan industri dan perdagangan.

Seperti uraian di atas, teori peran berasumsi bahwa aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, seperti mulai dari posisi sebagai Pemerintah Pusat maupun Daerah, Menteri Perdagangan dan Kepala Dinas Perdagangan yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku tersendiri. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu sesuai dengan perannya masing-masing. Harapan atau dugaan (expectation) itulah yang membentuk suatu peranan.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Hans Morgenthau menyatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah

.....

didasarkan kepada kepentingan politik domestik atau politik luar negeri yang merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional negara tersebut.¹⁰

Menurut Joseph Frankel, kepentingan nasional merupakan aspirasional, yaitu gambaran tentang kehidupan yang baik, serangkaian tujuan ideal, yang hendak dicapai oleh negara.¹¹

Di dalam GBHN jelas tercantum kepentingan Indonesia di mana di dalamnya terdapat daftar tujuan yang hendak digapai oleh pemerintah setiap 5 tahun bersama rakyat pada periode tertentu. Seperti GBHN tahun 1999-2004 yang memuat sasaran utama dalam pembangunan jangka panjang yaitu terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila .

Pemerintah telah menetapkan 'Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009' sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009 yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004 - 2009 yaitu:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;

¹⁰ Drs. Djumadi M.Si, *Politik Luar Negeri Indonesia, Pengantar*, ..Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal. 52

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Di dalam visi pembangunan nasional tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) 'Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004 - 2009'¹² yaitu:

1. Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai;
2. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis;
3. Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera

Pelaksanaan pembangunan sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi secara seksama maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting. Dengan arah dan sasaran tersebut, maka pembangunan industri bukan saja berarti harus semakin

¹² [www. Depertemenluarnegerirepublikindonesia.com](http://www.Depertemenluarnegerirepublikindonesia.com), diakses 17 Jul 2006

ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang, tetapi pelaksanaannya harus pula makin mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu sendiri.

Kepentingan nasional Indonesia dalam segi pemulihan ekonomi nasional bertujuan meningkatkan hubungan serta kerjasama ekonomi dan perdagangan luar negeri dalam rangka memantapkan pemulihan ekonomi nasional. Konsentrasi pembangunan ekonomi nasional Indonesia diarahkan pada upaya untuk memulihkan sendi-sendi perekonomian nasional, yang mengalami kemerosotan semenjak munculnya krisis moneter.¹³

Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Dinas Perdagangan dalam meningkatkan ekspor daerah dalam hal ini ekspor untuk produk kulit ke pasar Amerika Serikat tidaklah tanpa alasan. Ini dikarenakan semakin tingginya nilai ekspor ke negara tersebut sebesar US\$ 17,960 menjadi US\$ 19,547 untuk tahun 2005-2006.¹⁴ Selain itu industri kulit pada umumnya dan kerajinan kulit pada khususnya merupakan salah satu komoditi unggulan dan primadona ekspor

¹³ Drs. Djumadi M.Si, *Politik Luar Negeri Indonesia : Pengantar*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal. 65

¹⁴ ...

Propinsi. DIY. yang menempati posisi tertinggi dalam ekspor Propinsi DIY, serta dijadikannya Amerika Serikat sebagai pasar utama ekspor produk asal Indonesia termasuk Propinsi. DIY Hal inilah yang merupakan landasan bagi kepentingan Indonesia pada umumnya dan Propinsi. DIY pada khususnya dalam strategi Dinas Perdagangan Propinsi. DIY meningkatkan ekspor produk kulit ke negara Amerika Serikat.

3. Teori Pembuatan Keputusan (William D. Coplin)

Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) menurut William D. Coplin 'Apabila kita menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan tidaklah benar jika dianggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi) tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: Pertama, kondisi politik dalam negeri Kedua, situasi ekonomi. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan dari politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi'¹⁵

¹⁵ Dan, Dismadi, M.Si, *Beberapa Faktor Penyebab Indonesia Menjadi Negara Berkembang Internasional* Universitas Muhammadiyah

Yang menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan luar negeri menyangkut kondisi politik Indonesia adalah sifat politik Indonesia yang bebas aktif dan berlandaskan Pancasila terutama sila ke II yaitu "kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Sila ini jelas menyangkut aspek kehidupan seluruh umat manusia yang mencita-citakan terwujudnya perikemanusiaan yang adil dan beradab yang kalau kita kaji lebih jauh pernyataan tersebut mencerminkan azas keseimbangan dan keserasian, bukan saja dalam hubungan antar manusia, tetapi juga dalam hubungan antar bangsa di dunia.

Dalam hal situasi ekonomi yang mempengaruhi keputusan, kebijakan luar negeri Indonesia, adanya orientasi Pemerintah Indonesia dalam renovasi ekonomi bangsa paska krisis yang melanda Asia dan juga paska gempa, ekonomi yang berbasis ekspor terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas, merupakan dasar kepentingan Indonesia atau dasar pertimbangan dalam membuat keputusan atau kebijakan luar negeri. Diharapkan dengan pemulihan ekonomi ini, situasi ekonomi di Indonesia dapat pulih seperti sedia kala bahkan lebih baik lagi yang selanjutnya berimbas pada peningkatan pembangunan di Indonesia terutama daerah.

Sedangkan dalam konteks internasional; dengan semakin ketatnya perdagangan global maka masing-masing pemerintah suatu negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan juga mengikuti perkembangan pasar agar dapat terus bersaing. Selain diadikannya Amerika Serikat sebagai pasar utama bagi

ekspor produk Indonesia pada umumnya dan Propinsi. DIY pada khususnya menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait kebijakan peningkatan ekspor produk kulit ke pasar Amerika Serikat

F. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan teori yang digunakan, maka penulis merumuskan hipotesa:

Strategi Dinas Perdagangan Propinsi. DIY dalam meningkatkan ekspor produk kulit ke pasar Amerika Serikat yaitu:

1. Meningkatkan peran pemerintah sebagai agen promosi dan fasilitator, sekaligus pengkoordinir bagi para eksportir.
2. Melakukan peninjauan ulang kebijakan-kebijakan ekspor yang dianggap tidak-sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pasar dewasa ini,
3. Membantu para eksportir dalam peningkatan kualitas SDM.

G. 1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deduktif, artinya berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik hipotesa yang selanjutnya akan dibuktikan melalui data empiris

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan juga data sekunder, dalam arti penulis langsung terjun kelapangan, baik itu ke Disperindagkop Propinsi. DIY, Dinas Perdagangan, bahkan kepada para eksportir kulit itu sendiri. Selain itu penulis juga menggunakan data-data yang telah ada, baik itu di internet, surat kabar, buku-buku, makalah, dokumen-dokumen resmi, yang semua itu dikelompokkan sehingga sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.

H. 1. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mempersempit jangkauan penelitian yang dimaksudkan agar dalam penggunaan data menjadi lebih *efisien*, atau dalam arti penulis bermaksud agar data yang akan diambil atau yang akan digunakan tidak terlalu luas sehingga tidak keluar dari permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini mempunyai jangkauan dari tahun 2000-2006, dari masa sebelum disahkannya peraturan otonomi daerah sampai ditahun 2006.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi Dinas Perdagangan Propinsi DIY dalam meningkatkan ekspor produk kulit ke pasar

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini akan dibagi dalam lima bab:

Bab I Berupa Pendahuluan yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, Batasan Masalah

Bab II Kinerja ekspor Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000-2006, peluang pasar bagi ekspor produk kulit asal Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke pasar Amerika Serikat, posisi Dinas Perdagangan dalam Disperindagkop beserta perannya

Bab III Hambatan yang dihadapi Pemerintah dan juga para eksportir kulit, dalam meningkatkan ekspor produk kulit ke pasar Amerika Serikat, baik itu hambatan tarif maupun non-tarif dan dari dalam negeri maupun dari Amerika Serikat itu sendiri

Bab IV Strategi yang dilakukan Dinas Perdagangan Propinsi DIY dalam meningkatkan